

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 12, Nomor 1, Oktober 2017

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terintegrasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

**PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan
Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi**

Umi Najikhah Fikriyati 1-16

***IMPLICATION OF CONFLICT OF OWNERSHIP REGIONAL
ASSETS IN THE EXPANSION OF BAU-BAU CITY
IN THE TERRITORY OF EX BUTON SULTANATE***

Darmin Tuwu 17-36

***SOBO PENDOPO DIALOGUE: Manifestation of Deliberative
Democracy in Bojonegoro Regency***

Galang Geraldly 37-54

**POLITIK IDENTITAS ANIMAL POP DANCE: Subbudaya dan
Gaya Hidup Hibrid**

Imam Setyobudi 55-70

**STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN DESA WISATA
DI SENDANGSARI, PAJANGAN, BANTUL, DIY**

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti 71-86

**KONTROL SOSIAL DALAM PEMBINAAN KARAKTER
RELIGIUS PESERTA DIDIK MUSLIM DI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL**

Khamalida Fitriyaningsih dan Syamsul Bakhri 87-96

**MEKANISME PENGELOLAAN KARET RAKYAT DI TABIR ILIR
JAMBI DALAM PERSPEKTIF TEORI PILIHAN RASIONAL**

Pahrudin HM 97-118

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Sufyati HS 119-136

ESTETIKA FASHION URBAN

Tri Aru Wiratno 137-150

**MERAWAT KALI-MERANCANG ASA KOTA: Kontestasi dan
Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta**

Siti Zunariyah dan Akhmad Ramdhon 151-170

RESENSI BUKU: Anak Mendambakan Orang Tua yang Utuh

Napsiah 171-178

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 1 ini mengkaji banyak persoalan dalam masyarakat, mulai dari permasalahan perkotaan sampai dengan permasalahan terorisme sebagai permasalahan rumit yang dihadapi oleh semua negara saat ini.

Tulisan Umi Najikhah Fikriyati yang berjudul “Perempuan dan Deradikalisasi: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi” menjelaskan hingga tahun 2016 jumlah pelaku tindakan terorisme berjumlah 1070 orang, dari jumlah tersebut sebagian telah menyelesaikan masa hukumannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan

fenomenologi menunjukkan bahwa dalam dua keluarga mantan terpidana terorisme, istri memiliki peran dalam menderadikalisasi para suami untuk tidak lagi terlibat dalam aksi terorisme. Proses deradikalisasi telah dimulai ketika suami menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan cara melakukan kunjungan rutin ke lembaga pemasyarakatan. Selain itu istri juga berusaha untuk tidak bergantung secara ekonomi kepada suami, hal ini secara tidak langsung dapat menjauhkan suami dari kelompok yang diikutinya.

Darmin Tuwu menulis tentang permasalahan konflik kepemilikan aset di daerah, dengan tulisannya yang berjudul “Implikasi Konflik Kepemilikan Aset Daerah dalam Pemekaran Kota Bau-Bau di Wilayah Eks Kesultanan Buton”. Menurut penulis konflik yang terjadi antara dua pemerintahan daerah ini, berawal ketika Kotif Bau-Bau ditingkatkan statusnya menjadi Kota Bau Bau, di mana hampir seluruh aset daerah Kabupaten Buton (kabupaten induk) berada dalam wilayah Kota Bau-Bau selaku Daerah Otonomi Baru. Tidak ada solusi konklusif untuk konflik yang dimulai pada tahun 2001, dampak dari konflik tersebut terlihat pada layanan publik, Pendapatan Asli Daerah, dan pemisahan sosial.

Galang Geraldly menulis tentang *Dialog Sobo Pendopo: Manifestasi Demokrasi Deliberasi di Kabupaten Bojonegoro*. Penulis menjelaskan latar belakang persoalan sosial ekonomi yang kompleks menjadi pemantik revolusi politik keterbukaan dan deliberasi di Kabupaten Bojonegoro. Dialog Sobo Pendopo, yang digagas sejak keterpilihan Kang Yoto-Kang Hartono dalam pilkada tahun 2008 ini, menjadi pintu dalam mendiseminasi praktik revolusi politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui *Open Government Partnership* 2016.

Imam Setyobudi menulis tentang Politik Identitas *Animal Pop Dance: Subbudaya dan Gaya Hidup Hibrid*. Menurutnya politik identitas dapat mengkonstruksi sebuah subbudaya dengan gaya hidup tertentu melalui penciptaan koreografi *Animal Pop Dance*. Suatu *hip hop* Indonesia yang merupakan proses hibridisasi hibrid dari *hip hop* yang tumbuh di Amerika Serikat oleh kalangan *Africa-America* dicampuradukan dengan tiga tari tradisi lokal Indonesia (Jawa, Sunda, Papua) bertema perilaku binatang. *Animal Pop Dance* merupakan tradisi dan budaya hibrid yang berhasrat melepaskan diri dari cengkeraman pola berpikir dikotomi dalam konteks pascakolonial.

Nur Endah Januarti dan V. Indah Sri Pinasti menulis tentang Strategi Pengembangan Lingkungan Desa Wisata di Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY. Nur Endah menjelaskan hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilaksanakan Desa Sendangsari dalam upaya pengelolaan lingkungan sebagai implementasi UU Desa dan UU Keistimewaan DIY dengan cara: (1) Pemetaan lingkungan berupa potensi desa; (2) Pemberdayaan sosial untuk optimalisasi potensi wisata; (3) Pemanfaatan lingkungan sebagai kawasan pengembangan Desa Wisata; dan (4) Daya dukung pemerintah dalam pengelolaan Desa Wisata.

Khamalida Fitriyaningsih dan Syamsul Bakhri menulis artikel yang berjudul "Kontrol Sosial dalam Pembinaan Karakter Religius Peserta Didik Muslim di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal". Menurutnya Karakter religius peserta didik SMK N 1 Dukuhturi dibina dengan membiasakan Sholat Dhuha. Sebagai kontrol sosial, guru menerapkan hukuman berupa penempelan pin bertuliskan "jangan tiru aku" bagi yang tidak rajin melaksanakan dan pemberian penghargaan berupa mukenah bagi yang rajin melaksanakan. Pembinaan karakter religius yang dilakukan adalah sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam, disiplin, toleran dan jujur melalui pembelajaran akidah. Pembiasaan

Sholat Dhuha baru dilaksanakan dengan maksimal oleh beberapa wali kelas; butuh dukungan dari seluruh warga sekolah agar bisa menjadi sebuah pembinaan karakter religius yang kuat. Dampaknya masih banyak peserta didik di kelas lain yang belum memiliki rasa kebutuhan spiritual.

Pahrudin menulis tentang Mekanisme Pengelolaan Karet Rakyat di Tabir Ilir Jambi, dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional. Penulis menjelaskan karet merupakan tanaman yang dibudidayakan dan menjadi tumpuan kehidupan banyak orang sejak lama, tak terkecuali petani di Tabir Ilir yang menjadi salah satu sentra karet di Provinsi Jambi dengan 15.787 hektare dan 8.050 keluarga. Untuk mendapatkan hasilnya, petani karet di Tabir Ilir menerapkan mekanisme pengelolaan karet secara mandiri dan menyerahkannya kepada pihak lain. Penerapan kedua mekanisme ini dilakukan oleh petani karet berdasarkan perspektif pilihan rasional mereka. Petani karet dengan sumber daya yang cukup akan memilih cara mengelola secara mandiri, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang memadai, akan memilih menyerahkan pengelolaan karetnya kepada orang lain. Mekanisme pengelolaan yang dipilih oleh petani karet ini berdampak pada ketimpangan pendapatan yang mereka peroleh. Di satu sisi, ada orang yang menghasilkan lebih dari pengelolaan karet yang mereka lakukan, sementara di sisi lain ada mendapat hasil yang kurang.

Sufyati menulis tentang *Corporate Social Responsibility: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Sufyati menegaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat hendaklah disertai transformasi secara seimbang, antara ekonomi, sosial dan lingkungan, kekuatan faktor itu akan membentuk kemandirian masyarakat, di samping faktor lainnya. Secara normatif penyelenggaraan program CSR, didorong oleh kesadaran untuk bertanggung jawab secara sosial, tetapi umumnya kepentingan untuk membentuk *corporate image* melalui bantuan terasa lebih menonjol, sehingga belum memikirkan aspek keberlanjutan pembangunan.

Tri Aru Wiratno menulis tentang “Estetika Fashion Urban”. Menurutnya keindahan sebuah realitas yang ada dalam sejarah kehidupan manusia, di mana menjadi keindahan sebuah kehidupan sehari-hari dari masyarakat urban. Bagi masyarakat urban, keindahan bukan sebuah nilai tapi sebagai sebuah tanda dan yang menandai sehingga keindahan bukan menjadi sebuah makna dan tujuan dari sebuah karya seni tapi sebuah gaya hidup (*lifestyle*) urban. Estetika

fashion Urban dengan pendekatan fenomena yang berkembang pada kehidupan masyarakat kota, saat ini. Bahwa estetika fashion menjadi bagian dari masyarakat urban. Sebagai gambaran dari masyarakat urban yang memberikan bentuk dari estetika fashion.

Siti Zunariyah dan Akhmad Ramdhon menulis tentang Merawat Kali-Merancang Asa Kota: Kontestasi dan Partisipasi Komunitas atas Dinamika Sungai di Kota Surakarta. Penulis menjelaskan kota-kota kini berubah oleh skema pembangunan yang dipaksakan oleh beragam kepentingan ekonomi, politik maupun budaya dalam relasi pusat dan daerah. Dalam satu dekade terakhir, kondisi atas dominasi pembangunan yang berorientasi pada aspek fisik tidak juga berubah. Dalam beberapa aspek skalanya makin besar dan makin massif oleh kepentingan desentralisasi. Kewenangan yang terdelegasi dalam kerangka kebijakan memberi pondasi bagi pemerintah daerah mengakselerasi perubahan lewat berbagai skema otonomi. Di mana orientasi yang paling dominan dari semua upaya tersebut adalah kota yang bertransformasi dengan nalar ekonomi-politik. Artikel ini menarasikan bagaimana skala pembangunan kota mengubah ruang-ruang spasial kota dan berimbas pada ekologi kota yaitu sungai. Narasi atas perubahan sungai dalam satu dekade terakhir bertransformasi oleh banyak penyebab dan bisa dilihat dari dimensi perubahan fisik maupun nonfisik. Orientasi pembangunan yang ada memarjinalkan sungai dan pada saat bersamaan sungai menanggung beban pembangunan. Titik krusial dari gagasan partisipasi juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kota, sungai dan warga yang tinggal dalam kesehariannya di kampung-kota. Situasi Surakarta memberi konstruksi kompleksitas relasi kepentingan komunitas serta pemaknaan ulang atas sungai sebagai bagian dari kota. Dinamika kampung-kota di kawasan sungai mampu merepresentasikan kontestasi nilai, kepentingan maupun relasi-relasi sosial dalam konteks kota.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 1. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



RESENSI BUKU: Anak Mendambakan Orang Tua yang Utuh*



Judul Asli	: Memutus Rantai Ketidakadilan <i>GLobal Care</i> dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)
Pengarang	: Maria Ulfah Anshor
Penerbit	: Yayasan Obor, 2017
Tebal buku	: 290 Halaman.
ISBN	: 978-682-433-433-8

Fenomena pekerja migran perempuan adalah fenomena yang global tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di negara-negara Amerika Latin, Srilanka, Filipina, dan negara-negara Afrika. Sehubungan dengan itu, berbagai penelitian terkait dengan pekerja migran banyak dilakukan baik di tingkat internasional maupun dari Indonesia. Di tingkat internasional seperti yang dilakukan oleh Sotelo dan Avila (1997) yang mengkaji pekerja migran perempuan di Amerika Latin (Meksiko, El Salvador dan Guatemala). Demikian juga dengan Ukwatta (2010) dan Bakker (2009), Bastia (2009) serta Yeates (2004) mengkaji perempuan migran di Irlandia. Sedangkan di Indonesia penelitian tentang migran perempuan dikaji oleh Rosadi (2010), Irianto (2011), Kustiani (2012) dan Aryani (2012). Dari seluruh kajian baik di tingkat internasional dan di Indonesia menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang dikirim ke luar negeri memiliki anak yang tentunya membutuhkan kasih sayang ibu terutama dalam hal pengasuhan dan perawatan.

Keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu adalah tempat pertama kali anak bersosialisasi. Anak akan memperoleh pengetahuan baik berupa norma dan nilai yang menjadi bekal hidup untuk bermasyarakat. Itu semua diperoleh dari orang-orang terdekat seperti orang tuanya. Namun, persoalan muncul kemudian apabila dalam sebuah keluarga tidak ada seorang ibu. Boleh jadi pengasuhan anak diambil alih oleh suami karena tugas pengasuhan anak tidak seutuhnya menjadi

tanggungjawab seorang istri. Alternatif lainnya pengasuhan anak diberikan kepada keluarga terdekat yang masih ada pertalian darah sehingga dapat dipercaya, bahkan bisa jadi sebuah menyewajasa dengan membayar orang lain untuk mengasuh anaknya yang ditinggal ke luar negeri dalam rangka memenuhi nafkah keluarganya. Namun, apakah ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Apakah anak akan merasa lebih nyaman dalam pengasuhan orang lain selain ibunya?. Bagaimana dinamika anak menjalankan kehidupannya tanpa didampingi atau tanpa pengawasan dari keluarganya? Bagaimana keputusan yang dianggap rasional untuk mengiring tumbuh kembang anak agar menjadi individu yang bertanggungjawab serta memiliki pondasi agama yang kokoh? Bagaimana regulasi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pengiriman Tenaga Kerja Perempuan Indonesia ke luar negeri? Apakah regulasi tersebut sudah memperhatikan hak anak yang ditinggalkan oleh pekerja perempuan yang memiliki anak?

Persoalan-persoalan di atas dikemukakan oleh Maria Ulfah Ansor (2017) dengan melakukan studi pada keluarga di Indramayu, yang istrinya bekerja di luar negeri dan memiliki anak yang masih memerlukan pengasuhan dan perawatan ibunya. Kasus tersebut diangkat pada tataran teoritis berjudul *Memutus rantai ketidakadilan global care* dalam pengasuhan anak tenaga kerja Indonesia perempuan dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh Yayasan Obor menyatakan bahwa, Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2012 sekitar 7 juta TKI, 80 % atau 5,6 juta adalah TKI perempuan yang masih dalam usia produktif yang bekerja di sektor rumah tangga (hlm. 1).

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) ke luar negeri tidak saja menyumbang pendapatan bagi keluarga, akan tetapi menyumbang pendapatan devisa negara sampai puluhan trilyun rupiah setiap tahun, sehingga mereka mendapat julukan sebagai pahlawan devisa. Julukan tersebut dibuktikan dengan perolehan devisa dari TKIP, tahun 2006 menghasilkan devisa sebesar US\$ 5,6 miliar. Selang 4 tahun kemudian yakni tahun 2010 perolehan devisa meningkat menjadi US 7,1 miliar, hal ini tidak termasuk gaji pekerja yang dibawa langsung saat pulang maupun yang dititipkan pada kerabat dekat (hlm. 2).

Namun, di balik limpahan material yang diperoleh dari pekerja migran perempuan tersebut, ada nilai sosial yang hilang yang tidak dapat dihargai berupa material, yakni hak azasi anak khususnya dalam hal pengasuhan dan perawatan dari ibunya. Anak kehilangan haknya untuk memperoleh kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

Hal ini yang tidak disadari oleh kelurga bahkan oleh pemerintah, sehingga tidak jarang pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri tanpa memperhitungkan konvensasi atas kerugian yang dialami oleh anak yang ditinggalkan.

Berdasarkan prinsip *global care chain*, penulis mengemukakan fakta-fakta bahwa anak yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri merupakan bagian dari *global care chain*, dimana saudara perempuan tertua menjadi pengasuhnya. Sementara ibu kandungannya merawat dan mengasuh anak tempat dia bekerja (*the final link*). Dengan demikian dalam teori *global care chain* mengatakan bahwa memulai kekuatannya dari sebuah negara miskin dan berakhir di sebuah negara kaya (hlm. 4).

Kasus yang ditemukan pada keluarga di Indramayu, ada lima tipe yang berperan dalam mengasuh anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di Indramayu yaitu: *pertama*, ayah sekaligus sebagai ibu pengganti bersama nenek dan keluarga batih. *Kedua*, nenek sebagai ibu/orang tua pengganti tanpa ayah dan bersama atau tidak bersama keluarg batih. *Ketiga*, tante atau bibi sebagai orang tua pengganti tanpa ayah. *Keempat*, nenek tiri sebagai orang tua pengganti melakukan pengasuhan bersama keluarganya. *Kelima*, pihak lain yang tidak memiliki hubungan biologis dengan anak dan kedua orang tuanya sebagai orang tua pengganti (236).

Dari lima tipe pengasuh anak Tenaga kerja Indonesia Perempuan (TPIP) di atas maka ditemukan capaian pemenuhan hak dan kesejahteraan sebagai berikut:

Tipe Pengasuhan	Pemenuhan Hak	Pemenuhan Kesejahteraan
Jenis 1: Ayah dibantu nenek dan keluarga Batih	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak secara fisik terpenuhi namun secara psikis dan sosial kurang terlindungi • Kurang mendapatkan kasih sayang dan bimbingan • Anak terlindungi dari kekerasan • Belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan dasar terpenuhi • Peningkatan taraf hidup kurang termotivasi • Hubungan sosial dengan keluarga dan teman terpelihara • Masalah yang terjadi pada anak tidak dikelola

Jenis 2: Nenek tanpa ayah bersama/tidak bersama keluarga batih

- Secara fisik terpenuhi haknya namun secara sosial kurang terpenuhi
- Anak mendapat perhatian, kasih sayang kurang optimal
- Sebagian terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi
- Kebutuhan dasar terpenuhi
- Peningkatan taraf hidup anak kurang termotiviasi
- Hubungan sosial dengan orang tua terpelihara
- Masalah yang terjadi pada anak tidak dikelola

Jenis 3: Tante atau bibi *uwak* tanpa ayah

- Secara fisik terpenuhi haknya namun secara sosial kurang terlindungi
- Kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan bimbingan
- Anak belum terlindungi dari kekerasan
- Kebutuhan dasar terpenuhi
- Peningkatan taraf hidup anak kurang termotivasi
- Hubungan sosial dengan orang tua terpelihara
- Masalah yang terjadi pada anak tidak dikelola

Jenis 4: Nenek tiri dan keluarganya

- Hak hidup, tumbuhkembang tidak terpenuhi baik fisik, psikis maupun sosial
- Tidak mendapat perhatian, kasih sayang dan bimbingan
- Tidak berorientasi pada kepentingan terbaik anak
- Tidak terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi
- Kebutuhan dasar tidak terpenuhi
- Peningkatan taraf hidup tidak pernah dimotivasi
- Hubungan sosial dengan orang tua tidak terpelihara, putus hubungan dengan ayah
- Masalah yang terjadi pada anak tidak dikelola

Jenis 5: Orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan

- Hak hidup, tumbuhkembang secara fisik terpenuhi namun secara psikis dan sosial belum seperti yang diharapkan
- Mendapat perhatian dan bimbingan untuk pendidikan yang lebih baik
- Belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak
- Terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi
- Kebutuhan dasar terpenuhi
- Peningkatan taraf hidup dimotivasi khususnya dalam hal pendidikan
- Interaksi dengan ibu terpelihara, ayahnya hilang kontak
- Masalah yang terjadi tidak dikelola

Dari lima tipe di atas, keluarga dekat adalah harapan utama yang bisa diandalkan untuk menggantikan peran ibu dalam pengasuhan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa seorang suami awalnya menyanggupi untuk mengasuh anak, namun alih-laih mengasuh anak, justru suami meninggalkan anaknya karena telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah memiliki anak tanpa sepengetahuan anggota keluarga. Lebih ironis lagi anak yang dihasilkan dari pernikahan yang kedua kalinya, dipaksakan untuk diakui sebagai adik oleh anak istri pertama. Kondisi seperti ini membuat anak semakin tertekan, sedih, kecewa, bahkan tidak percaya diri.

Hal yang sama juga terjadi pada anak yang diasuh oleh tante nenek, dan pihak lain, juga sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologis anak. Hal ini disebabkan karena ketatnya aturan yang diterapkan oleh pengasuh kepada anak, sehingga anak merasa tertekan. Perasaan tersebut tidak bisa dikemukakan karena kalau melawan aturan maka hukuman fisik seperti dicubit seringkali diterima oleh anak apabila tidak mengikuti perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh pengasuhnya.

Pengasuhan anak tersebut diperburuk lagi karena seringkali terjadi konflik antara orang tua mereka, seperti ayah si anak berselingkuh atau ibunya telah menikah dengan laki-laki di tempat

kerjanya dan membawa anak ke tempat asalnya. Kondisi tersebut membuat malu keluarga sehingga terpaksa anak harus diungsikan sementara waktu ke rumah neneknya sampai ibu kembali ke luar negeri. Dengan demikian, maka implikasi dari konflik orang tua menimbulkan kerugian secara psikologis anak terganggu, anak tidak memiliki jaminan sosial dan anak tidak terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi (hlm. 107).

Ketidakhadiran seorang ibu di tengah-tengah keluarga berdampak pada putusannya hubungan kedekatan antara anak dengan ibu dan anak dengan ayah, sehingga nilai yang dianut dalam keluarga tersebut tidak dapat disosialisasikan dengan baik kepada anak. Dengan demikian, anak kehilangan pigur orang tuanya. Apabila keterputusan itu dibiarkan berlalut-larut bukan hal yang mustahil berdampak yang sama pada keluarga perkotaan di Bolivia, seperti yang terungkap dalam penelitian Bastia (2009) anak-anak yang ditinggalkan ibunya mengalami dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak. Anak menjurus ke dalam pergaulan bebas bahkan hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan karena tidak ada kontrol dari keluarga. Meskipun dalam penelitian ini tidak ditemukan kasus-kasus yang seperti yang diteliti oleh Bastian, namun bisa jadi apabila tidak ada kontrol orang tua dan agama maka anak-anak pekerja migran di Indramayu akan mengalami hal yang sama buruknya.

Sehubungan dengan itu, tindakan orang tua untuk memasukkan anak ke pondok pesantren menjadi cara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun sebenarnya keluarga adalah tempat pertama kali anak memperoleh pengetahuan agama, namun anak TKIP pertama kali memperoleh nilai agama justru saat mereka memasuki pondok pesantren. Di pondok pesantren anak memperoleh nilai agama yang kuat. Selain itu mereka memiliki kyai dan nyai yang dapat dijadikan pengganti ayah dan ibu. Selain itu mereka memiliki teman-teman santri yang dianggap sebagai saudara kandung mereka.

Apabila anak sakit, maka pengelola pondok memberikan izin untuk istirahat, bahkan dibawa ke dokter atau puskesmas untuk berobat. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan secara cepat oleh para pengelola pondok. Selain itu, pengelola pondok akan memberikan izin kepada anak yang sakit untuk beristirahat sampai kondisinya pulih. Sehubungan dengan itu, jaminan kesehatan juga diperoleh anak di pondok pesantren.

Selain itu, di pondok anak memperoleh pengetahuan agama, yang paling sederhana dan realistis adalah mereka dapat menjalankan

solat dengan benar dan memiliki pengetahuan agama yang cukup. Sebab sebelumnya anak-anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) belum pernah belajar agama, baik yang diajarkan oleh orang tuanya ataupun pengajian dari kampungnya (hlm.135).

Di pondok pesantren anak memperoleh pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain itu, di pondok pesantren karena memiliki disiplin yang ketat maka berdampak pada kepribadian yang kokoh, percaya diri, menghargai waktu termasuk waktu shalat tepat waktu, lebih giat dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab dalam bertindak (hlm. 140). Demikian juga dengan pengamalan nilai, budi pekerti atau akhlak mulia seperti kejujuran, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, keikhlasan dalam beramal yang ditanamkan dalam hidup keseharian anak di pesantren berdampak juga positif bagi kepribadian anak. Dengan demikian, anak memiliki kepribadian yang ikhlas, sabar, tidak sombong, mengerti sopan santun, menghargai perbedaan dan keragaman, bisa bekerja dengan tim, menghargai orang tua, guru dan orang lain.

Secara umum, pondok pesantren telah menunjukkan perannya memutus ketidakadilan *global care* karena anak mendapatkan memberikan kasih sayang, perawatan, dan bimbingan kepada anak TKIP. Begitu juga apabila ada anak yang sakit, santri diberi obat secara cepat, dirawat dengan cara diantar ke dokter atau puskesmas. Dengan cara itu, anak memperoleh kembali hak yang telah dirampas oleh anak yang diasuh oleh ibunya yang sanggup membayarnya mahal di luar negeri.

Namun meskipun pondok telah menjalankan perannya untuk memutus mata rantai ketidakadilan dalam *global care chain*, pemerintah belum melibatkan pondok dalam hal pengasuhan anak tenaga kerja Indonesia. Selama ini peraturan migrasi di Indonesia hanya mengatur buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri saja, dan dari keseluruhan hak-hak mereka hanya 20 % diatur dalam regulasi nasional, 80 % sisanya belum diatur, apalagi jaminan pengasuhan dan kesejahteraan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TPKI) sudah dipastikan tidak ada peraturannya (hlm. 291). Dengan demikian, anak-anak mendapatkan perlindungan namun hak azasi anak tetap terampas yaitu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua seutuhnya.

Kerugian-kerugian anak terkait dengan mendapatkan kasih sayang menurut penulis dapat dikonvensasi oleh pemerintah dengan cara bekerjasama dengan pondok untuk memberikan perlindungan terhadap hak asuh anak tenaga kerja Indonesia, sehingga pondok akan

memberikan pelayanan yang jauh lebih baik pada anak-anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan. Gagasan ini yang direkomendasikan oleh penulis kepada para pembuat kebijakan hak-hak anak.

Buku ini bermula dari Disertasi di Universitas Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2017. Penyajian data sangat komprehensif sehingga memudahkan para pembaca untuk mengetahui kasus keluarga di Indramayu, yang bisa jadi kasus-kasus serupa terjadi di daerah-daerah lain yang mengirimkan tenaga kerja perempuan bekerja ke luar negeri dengan alasan pemenuhan ekonomi keluarga. Terkait dengan itu, menjaga keutuhan keluarga jauh lebih penting untuk menyelamatkan generasi penerus yang berahlak mulia dengan cara bersinergi antara anggota keluarga, pondok pesantren, masyarakat dan pemerintah.

Kepiawaian penulis dalam mengintegrasikan dan menginterkoneksi antara ilmu umum dengan ilmu agama menjadi daya tarik buku ini, sehingga buku ini layak dibaca oleh dosen, Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa bahkan kalangan pemerhati persoalan keluarga.

***) Napsiah**

email: napsiah@uin_suka.ac.id